

Determinants of Local Government Financial Performance with Capital Expenditure as a Moderating Variable **[Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi]**

Alfina Dwi Wulandari¹⁾, Sarwenda Biduri²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *This study was conducted with the aim of examining the role of Capital Expenditure in moderating Local Government Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, and Leverage on Local Government Financial Performance in Regency / City in East Java Province in 2020 - 2022. The research was conducted using quantitative methods in the form of Balance Sheet and LRA reports. The results showed that Regional Wealth and Intergovernmental Revenue had a significant positive effect on Local Government Financial Performance. While Local Government Size and Leverage have no significant effect on Local Government Financial Performance. Capital expenditure is only able to strengthen the relationship between Regional Wealth and Intergovernmental Revenue on Local Government Financial Performance. Conversely, the results show that capital expenditure weakens the relationship between Local Government Size and Leverage on Local Government Financial Performance.*

Keywords - *Local Government Size, Regional Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, Government Financial Performance, Capital Expenditure*

Abstrak. *Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji peran Belanja Modal dalam memoderasi Ukuran Pemerintah Daerah, Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 – 2022. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif berupa Laporan Neraca dan LRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regional Wealth dan Intergovernmental Revenue berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal hanya mampu memperkuat hubungan antara Regional Wealth dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, adapun hasil yang menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

Kata Kunci - *Ukuran Pemerintah Daerah, Regional Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Modal*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan keberagaman yang melimpah, mulai dari keberagaman budaya, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan pendapatan dan keberagaman lainnya. Indonesia telah menerbitkan konsep sistem pemerintahan yang berupa otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola keberagaman ini. Otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memegang wewenang dalam mengelola kekuasaannya, terutama dalam hal mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini mencakup penganggaran, kekayaan daerah, pendapatan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah yang disebutkan dalam UU No. 12 Th 2008 mengenai pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan dan UU No. 33 Th 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola dan mengurus sendiri kepentingan pemerintahan dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan suatu bagian yang harus dicapai untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan menggunakan indikator kinerja keuangan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah [1]. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam memahami penggunaan sumber daya publik untuk mendukung pembangunan serta menyediakan pelayanan publik yang lebih unggul bagi masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi otonomi daerah. Hal ini dikarenakan masing – masing daerah memiliki kekayaan dan sumber daya manusia yang bervariasi, sehingga pendapatan antar pemerintah mendapatkan penerimaan yang bervariasi juga. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari pengelolaan keuangan dalam mencapai target serta

tujuan yang menggambarkan visi dan misi instansi pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang diterapkan [2].

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, baik secara efektif, efisien, dan transparan. Namun dalam proses pengelolaannya, masih ada yang belum optimal mencapai tingkat kinerja. Pencapaian suatu otonomi daerah dapat dinilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi kenyataannya pemerintahan daerah masih ketergantungan dengan dana bantuan atau biasa disebut dana perimbangan [3]. Terdapat fenomena yang terjadi pada tahun 2020 yang dilansir melalui salah satu website jawa pos [4]. Anggaran pendapatan daerah kabupaten sidoarjo mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 583,4 M atau 12,86% menjadi Rp. 3,9 T yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar 18,88% menjadi 341,8 M dikarenakan pemerintah mengidentifikasi turunnya pajak daerah sebesar 23,15% dan adanya target retribusi yang turun 29,62%. Selain itu, dalam artikel Radar Sidoarjo juga menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2023 baru mencapai sekitar Rp. 745 M, dimana masih jauh dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp. 1,9 T [5]. Dengan pencapaian tersebut, hanya tercapai 39% dari target yang ditetapkan. Terkait pernyataan tersebut membuat anggota komisi DPRD meminta semua pimpinan perangkat daerah ikut serta memonitor secara langsung kondisi lapangan, untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah yang berpengaruh buruk pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari penjelasan fenomena yang ada, dapat memberi dampak yang buruk terutama dalam masalah utang daerah yang semakin meningkat serta terjadi pemangkasan dana dikarenakan kurangnya anggaran pendapatan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa aspek yang mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah. Aspek pertama yang mempengaruhi adalah *Regional Wealth* (Kekayaan/Sumber Daya). *Regional Wealth* atau tingkat kekayaan suatu daerah biasanya mengacu pada nilai atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Tingkat kekayaan daerah dapat dinilai dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan [6]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sumber yang didapatkan dari PAD antara lain adalah : retribusi daerah, pajak daerah, hasil pemisahan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya. Tingginya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang paling efektif dalam mendapatkan berbagai sumber PAD, sehingga memiliki tingkat kekayaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang pendapatannya masih rendah. Dengan demikian, pemerintah daerah yang menghasilkan PAD tinggi lebih mudah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Kemudian, jika pelayanan publik meningkat dan kebutuhan daerah sudah aman terpenuhi maka kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan efektif [7]. Oleh karena itu, variabel ini merujuk pada teori keagenan untuk mendorong tanggung jawab yang besar dalam melaporkan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan harapan *principal*. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai *Regional Wealth* (Kekayaan) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya memiliki pengaruh negatif yang artinya penerimaan kekayaan daerah tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan [3]. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [8]. Sedangkan hasil penelitian yang lainnya juga mengindikasikan bahwa *regional wealth* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [9]. Adapun hasil yang sama juga membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kekayaan daerah [10].

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah selanjutnya adalah *size* (Ukuran Pemerintah Daerah). *Size* merupakan suatu gambaran untuk mengidentifikasi besar kecilnya pemerintahan melalui total pendapatan, total aset, tingkat produktivitas dan lain sebagainya [11]. Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* yang menggambarkan situasi manajemen yang bertanggung jawab dengan didorong pada pencapaian hasil suatu entitas, karena pemerintah daerah yang memiliki skala besar akan mencerminkan kinerja yang lebih unggul dibanding dengan pemerintah yang memiliki skala lebih kecil. Di dalam suatu pemerintahan yang mempunyai ukuran besar dengan mencerminkan total asetnya akan dapat menjalankan aktivitas operasional dengan lancar serta lebih mudah menyediakan pelayanan publik yang memadai. Selain itu, bidang operasional juga akan berjalan secara efektif dan akan memberikan kelancaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan sebagai bukti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan [12]. Terdapat penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) memiliki pengaruh positif dan memiliki peran cukup penting untuk kinerja keuangan pemerintah daerah [13]. Selain itu, ada juga peneliti yang mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah yang dihitung melalui total aset memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [14]. Ada juga sebaliknya, peneliti ini membuktikan ukuran pemerintah yang juga dihitung dengan total aset memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dikarenakan peran aset belum berfungsi dengan efektif [15]. Menurut peneliti selanjutnya, hasil penelitiannya menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah [16].

Selain *Regional Wealth* dan *Size*, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya yaitu *Intergovernmental Revenue* atau Pendapatan Antar Pemerintah.

Intergovernmental Revenue merupakan suatu pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat melalui sumber eksternal untuk membiayai serta mendukung kegiatan operasional tanpa memerlukan pengembalian pembayaran [17]. *Intergovernmental revenue* adalah cerminan dari Dana Perimbangan yang mendapatkan sumber dana melalui pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan untuk mendanai kekurangan dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada masa sekarang dana perimbangan berkontribusi dengan struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dimana hal itu dapat menunjukkan bahwa setiap daerah masih mengandalkan dana perimbangan dalam mendanai kegiatannya. Dalam menyelenggarakan kegiatan di suatu instansi sebagai bentuk peningkatan layanan publik kepada masyarakat tidak dapat mengandalkan dana dari Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan jumlah yang diperoleh terbatas dan memerlukan dana perimbangan itu sebagai dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat [18]. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* karena banyak pihak – pihak yang ikut terlibat dalam satu organisasi serta memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membuktikan mengenai *intergovernmental revenue* memiliki hubungan negatif namun berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [19]. Adapun peneliti yang dapat membuktikan bahwa pendapatan antar memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut telah dibuktikan dengan meningkatnya pelayanan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera [20]. Sama halnya dengan peneliti ini, mengungkapkan bahwa *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [21]. Berbeda dengan penelitian selanjutnya, *Intergovernmental Revenue* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan pemerintah pusat, maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan [22].

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu *leverage* yang biasa disebut hutang atau modal pinjaman. *Leverage* berkaitan dengan penggunaan aset, dimana pemerintahan harus menutup biaya tetap dari penggunaan aset tersebut. Di dalam akuntansi sektor publik, *leverage* merupakan suatu perbandingan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah bergantung pada kreditur dalam mendanai aset daerahnya [23]. *Leverage* digunakan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah, dengan mengontrol jumlah aset yang lebih. Suatu pemerintahan yang memiliki *leverage* besar akan mendapat pengawasan ekstra dari kreditor, apapun kegiatan yang dilakukan entitas harus melalui persetujuan kreditor. Dilakukannya pengawasan berguna untuk memberikan dampak yang baik untuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka *grand theory* yang tepat untuk digunakan adalah teori keagenan karena melibatkan pemerintah daerah (agen) dan pemegang kredit (principal) untuk memastikan kebenaran suatu tindakan. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh negative namun signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [24]. Namun, ada juga yang membuktikan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [25]. Begitupun dengan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh *leverage* karena setiap tahunnya ekuitas dana melebihi kewajiban [26].

Berdasarkan pengungkapan hasil *research gap* terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, *intergovernmental revenue* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti menambahkan variabel tambahan dalam penelitian ini yaitu satu variabel independen berupa *leverage* dan variabel moderasi berupa belanja modal, yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran pemerintah daerah, *regional wealth*, *intergovernmental revenue* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Belanja modal memiliki tujuan untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah dan akan menambahkan belanja yang bersifat rutin, seperti belanja administrasi umum, belanja peralatan dan mesin, belanja infrastruktur dan lain sebagainya. Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang memberikan manfaatnya lebih dari satu periode anggaran [27]. Suatu belanja dianggap sebagai belanja modal apabila pengeluaran menyebabkan adanya perolehan aset tetap yang meningkatkan masa manfaat serta jika pengeluaran melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan oleh pemerintah [28]. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan belanja modal dijadikan sebagai variabel moderasi yaitu karena belanja modal memiliki hubungan kompleks dengan ukuran pemerintah daerah, *regional wealth*, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*, yang secara bersama – sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan infrastruktur, pendanaan tambahan dari pendapatan antarpemerintah bisa memperkuat alokasi belanja modal serta tingkat *leverage* yang bijaksana dapat mendukung investasi jangka panjang tanpa meningkatkan risiko keuangan yang tidak terkendali. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, *intergovernmental revenue* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi jarang ditemui. Namun, beberapa jurnal telah mengungkapkan bahwa belanja modal tidak dapat memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan *intergovernmental revenue*, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [29]. Sebaliknya, pada penelitian ini juga ditemukan hasil yang

menunjukkan bahwa belanja modal dapat memperkuat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah [30].

Peneliti ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh [31]. Pembaruan dari penelitian ini yaitu dengan menambahkan satu variabel independen yaitu *leverage*. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan dan terdapat hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian sebelumnya membuat minat peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dilakukannya penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat terhadap suatu entitas pemerintah daerah maupun pusat untuk memahami faktor yang dapat mempengaruhi tingkat stabilitas kinerja keuangan dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah, *regional wealth*, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*. Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui peran Belanja Modal dalam memoderasi Ukuran Pemerintah Daerah, *Wealth*, *Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 – 2022.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu nilai yang membuktikan besar kecilnya suatu entitas dengan diukur menggunakan total aset yang diperoleh dalam 1 tahun. Total aset maupun pendapatan pemerintah yang besar dapat menjamin kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional dan mempermudah dalam pelayanan dengan fasilitas yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan sumber daya dan fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat [32]. *Grand Theory* yang mendasar dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Teori ini menggambarkan kondisi manajemen yang termotivasi pada pencapaian hasil dan kepuasan suatu entitas karena keberhasilan entitas menggambarkan pencapaian yang maksimal untuk kelompok principal dan manajemen. Dengan adanya teori ini diharapkan agar menjalankan tugas dengan baik dan akurat, merencanakan, serta melaksanakan anggaran pendapatan sesuai dengan amanahnya, yang akan dapat menguntungkan kepentingan principal atau masyarakat [33]. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah [34]. Begitupun juga dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya perubahan, baik peningkatan maupun penurunan ukuran pemerintah daerah terutama dalam hal pertumbuhan total aset dapat membuktikan bahwa *Local Government Size* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [32]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Regional Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari tingkat kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi kekayaan daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga semakin baik dan begitupun sebaliknya. Penelitian ini menerapkan teori keagenan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah karena agen sering bertindak sesuai kepentingan sendiri tanpa memperdulikan kepentingan principal. Dengan adanya teori agen, pemerintah lebih bertanggung jawab dalam melaporkan dan mengelola kekayaan daerah sesuai dengan yang diharapkan oleh principal. Dalam penelitian ini membuktikan jika tingkat kekayaan daerah (*regional wealth*) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [9]. Hasil yang sama juga didapat dalam penelitian ini yaitu kekayaan daerah (*regional wealth*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [10]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Regional Wealth* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan antar pemerintah (*intergovernmental revenue*) atau biasa disebut dengan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan untuk mendanai kegiatan desentralisasi. Dana perimbangan tidak dimaksudkan untuk membiayai kewenangannya, melainkan untuk mengurangi pembiayaan antara pemerintahan daerah dan pusat [6]. Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan penggunaan dana perimbangan, pemerintah harus mengatur penggunaannya sesuai dengan yang ditetapkan. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, terutama pemerintah pusat [35]. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi sektor publik dan bukan digunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Menurut peneliti ini hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah berpengaruh secara negatif [36].

Begitupun dengan peneliti ini juga membuktikan bahwa Pendapatan antar pemerintah (*intergovernmental revenue*) berpengaruh secara negatif namun signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah [19]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar utang pemerintah dari pihak eksternal dengan modal. Hal tersebut menunjukkan jika jumlah utang yang dimiliki pemerintah lebih besar daripada modal sendiri memiliki arti bahwa sumber utama pembiayaan suatu entitas didapatkan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, *leverage* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah dimana *leverage* mencakup pemberian pinjaman yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan program atau kegiatan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, dimana agen (pemerintah) mempunyai tanggung jawab untuk membayar utang, sedangkan *principal* (masyarakat) bertugas mengelola dan menjadikannya manfaat jangka panjang. Salah satu peneliti membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah [24]. Begitupun dengan hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [13]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Local government size (ukuran pemerintah daerah) menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas berpengaruh terhadap keputusan pengelolaan keuangan, termasuk dalam penentuan alokasi anggaran untuk keperluan belanja modal. Jika ukuran pemerintahan dilihat melalui skala besar kecilnya suatu entitas, maka akan membutuhkan investasi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur agar skala yang dihasilkan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Ukuran pemerintah bisa memenuhi kebutuhan yang besar didapatkan melalui belanja modal untuk memenuhi permintaan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan memperkuat ukuran pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah [37]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Belanja modal memoderasi hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Regional Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Belanja modal memiliki potensi untuk memperkuat kekayaan daerah dan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah dalam sektor publik. Pengalokasian dana belanja modal untuk meningkatkan layanan publik fasilitas kesehatan, pendidikan serta proyek infrastruktur jalan dan lain sebagainya dapat meningkatkan kekayaan daerah yang membawa pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya penelitian ini, membuktikan bahwa belanja modal mampu memperkuat kekayaan daerah (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [38]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Belanja modal memoderasi hubungan antara *regional wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Pendapatan antar pemerintah (*Intergovernmental Revenue*) merupakan pendapatan yang diterima secara langsung oleh pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi kondisi keuangan yang mengalami penurunan dan kurangnya kapasitas pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat menerapkan kebijakan transfer dana ataupun bantuan dana antar pemerintah untuk menyeimbangkan pendapatan. Telah dibuktikan dalam penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan antar pemerintah atau biasa disebut dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui belanja modal sebagai variable moderasi [30]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Belanja modal memoderasi hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

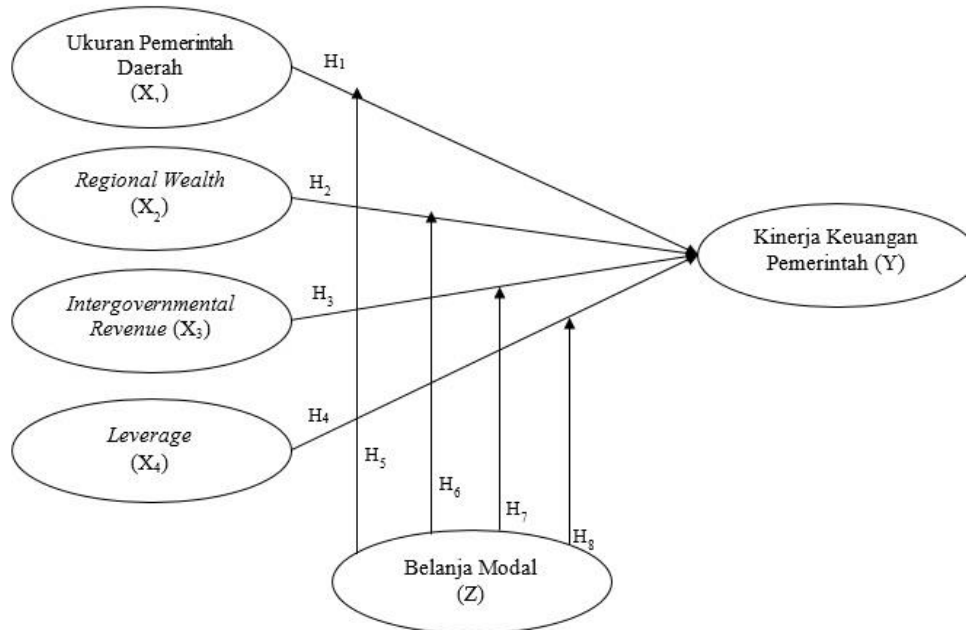
Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan aset jangka panjang yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan fasilitas yang tercukupi untuk

mendukung kegiatan sektor publik. Jika kegiatan tersebut berjalan secara efektif, maka akan meningkatkan pendapatan yang dapat membantu untuk membayar utang dan mengurangi beban jangka panjang. Pengelolaan pendapatan dari belanja modal dengan baik, dapat menyeimbangkan keuangan pemerintah. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa belanja modal memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [37]. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka ditemukan hipotesis sebagai berikut :

H₈ : Belanja modal memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian dapat diilustrasikan seperti di bawah ini :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

II. METODE

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Objek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pengambilan sampel melalui situs *website* dan *email* BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta *website* dari masing – masing kabupaten atau kota [39].

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dari penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Teknik Pengumpulan data ini berupa data sekunder yang didapatkan melalui situs *website* dan *email* BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mendatangi kantor BPK secara langsung untuk meminta izin mengakses data LKPD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020 – 2022 dengan total populasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan adalah:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur	38
2	Pemerintah daerah yang tidak menyediakan laporan neraca	(8)
3	Pemerintah daerah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap	30
4	Jumlah tahun penelitian	3
Jumlah Unit Analisis		90

Sumber : Diringkas oleh peneliti

Identifikasi dan Indikator Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yang terdiri dari : ukuran pemerintah daerah, *regional wealth*, *intergovernmental revenue* dan *leverage*. variabel moderasi yang digunakan yaitu belanja modal. Dibawah ini merupakan tabel indikator variabel :

Table 2
Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Sumber : [17] dan [7]	Rasio
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	Ln Total Aset Sumber : [16]	Rasio
<i>Regional Wealth</i> (X2)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$ Sumber : [40]	Rasio
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X3)	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$ Sumber : [40] dan [17]	Rasio
<i>Leverage</i> (X4)	$\frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$ Sumber : [24]	Rasio
Belanja Modal (Z)	Ln Total Belanja Modal Sumber : [41]	Rasio

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Squares*) dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS 3*. PLS merupakan bagian dari pendekatan SEM yang pada awalnya berfokus pada kovarian beralih menjadi berbasis varian. Teknik analisis PLS (*Partial Least Squares*) terdiri dari outer model dan inner model. Outer model diukur menggunakan 3 indikator. Indikator pertama menggunakan validitas konvergen (*convergent validity*), dimana validitas dianggap memadai jika korelasi menunjukkan nilai > 0.70. Yang kedua dilihat dari nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*) jika memadai dengan menunjukkan nilai > 0.50. Ketiga menggunakan *cronbachs alpha* dimana data yang mempunyai > 0.70 maka mempunyai reabilitas tinggi. Sementara itu, pengukuran inner model digunakan untuk mengidentifikasi hubungan konstruk, nilai signifikan dan menentukan *R square*. Inner model dapat diukur menggunakan *R Square* untuk konstruk dependen Uji t dan signifikan dari koefisien parameter jalur.

Uji Hipotesis

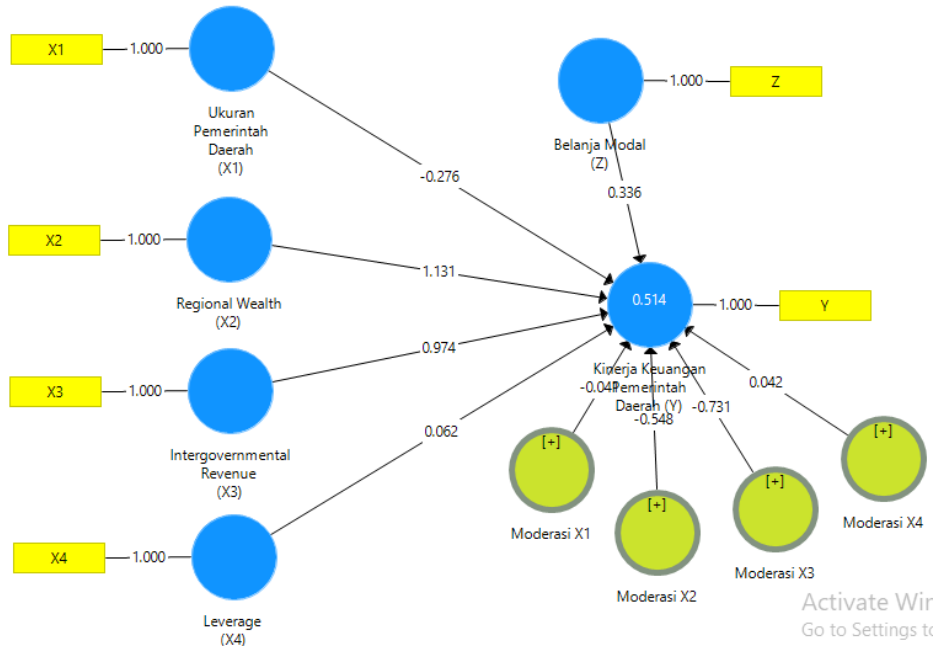
Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai-t statistik dan nilai-t tabel. Jika nilai-t statistik lebih besar daripada nilai-t tabel, yaitu 1.96, dengan signifikansi nilai *p values* < 0.05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai-t statistik lebih kecil daripada nilai-t tabel, dengan signifikansi nilai *p values* > 0.05, maka hipotesis ditolak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Evaluasi Outer Model

Evaluasi model pengukuran adalah penilaian terhadap korelasi antara konsep dan penunjuknya. Evaluasi outer model menggunakan refleksi yang dinilai melalui uji validitas konstruk yang meliputi uji validitas diskriminan dan uji validitas konvergen. Dibawah ini adalah hasil pengujian dari evaluasi tersebut.



Gambar 2
Output Outer Model Moderasi SmartPLS
Sumber Gambar : Data Diolah Di *SmartPLS*

Convergent Validity

Tabel 3
Outer Loading

	Z	Y	X1	X2	X3	X4	X1*Z	X2*Z	X3*Z	X4*Z
Ukuran Pemerintah Daerah* Belanja Modal							1.717			
Regional Wealth* Belanja Modal								1.828		
Intergovernmental Revenue* Belanja Modal									1.743	
Leverage * Belanja Modal										0.741
Ukuran Pemerintah Daerah			1.000							
Regional Wealth				1.000						
Intergovernmental Revenue					1.000					
Leverage						1.000				

Kinerja Keuangan		1.000								
Belanja Modal	1.000									

Sumber : Hasil Output *SmartPLS*

Evaluasi outer model melibatkan uji *convergent validity*, dimana kesesuaian nilai *outer loading* tergantung pada indikator yang sedang dianalisis. Uji tersebut memiliki *rule of thumb* yang dianggap memadai jika nilai *outer loading* sebesar >0.70 . Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel 3 dan gambar 2, indikator tersebut menunjukkan hasil nilai *outer loading* sebesar >0.70 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator beserta konstruk dari tiap variabelnya telah memperoleh *convergent validity* yang memadai.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan (*Discriminant Validity*) digunakan untuk menilai seberapa jelas perbedaan konstruk yang diukur oleh indikator dalam model. Validitas diskriminan ini sangat penting dalam analisis PLS karena dapat memastikan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk yang berbeda tidak terlalu berkorelasi satu sama lain.

Tabel 4
Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Ukuran Pemerintah Daerah	1.000
<i>Regional Wealth</i>	1.000
<i>Intergovernmental Revenue</i>	1.000
<i>Leverage</i>	1.000
Kinerja Keuangan	1.000
Moderasi X1	1.000
Moderasi X2	1.000
Moderasi X3	1.000
Moderasi X4	1.000
Belanja Modal	1.000

Sumber : Hasil Output *SmartPLS*

Dalam *SmartPLS* pengujian discriminant validity dilakukan dengan uji *Fornell-Larcker*, dimana uji ini melibatkan perbandingan akar kuadrat nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*) dari tiap konstruk dengan korelasi antar konstruk tersebut. Nilai *AVE* digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif indikator yang dipakai dalam mengukur suatu konstruk yang mampu menjelaskan variasi dalam konstruk tersebut. Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dianggap memadai apabila mencapai 0.5 atau lebih. Dengan adanya nilai *AVE* yang tinggi, menunjukkan bahwa indikator – indikator tersebut secara bersamaan mengukur konstruk dengan baik. Pada tabel 4 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sebesar >0.5 , sehingga disimpulkan bahwa indikator tersebut mengukur konstruk dengan baik.

Composite Reability

Tabel 5
Composite Reability

	<i>Composite Reability</i>
Ukuran Pemerintah Daerah	1.000
<i>Regional Wealth</i>	1.000
<i>Intergovernmental Revenue</i>	1.000
<i>Leverage</i>	1.000
Kinerja Keuangan	1.000
Moderasi X1	1.000
Moderasi X2	1.000
Moderasi X3	1.000
Moderasi X4	1.000
Belanja Modal	1.000

Sumber : Hasil Output *SmartPLS*

Composite Reability (CR) digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif indikator – indikator tersebut mengukur konstruk yang sama. Nilai *CR (Composite Reability)* dianggap baik jika nilainya > 0.7 atau 0.8 karena semakin tinggi nilai *CR* akan semakin baik ketepatan konstruksinya. Pada tabel 5 diperoleh hasil dari masing masing konstruk memiliki nilai *Composite Reability (CR)* yang memuaskan karena nilainya > 0.7.

Cronbach's Alpha

Tabel 6
Cronbach's Alpha

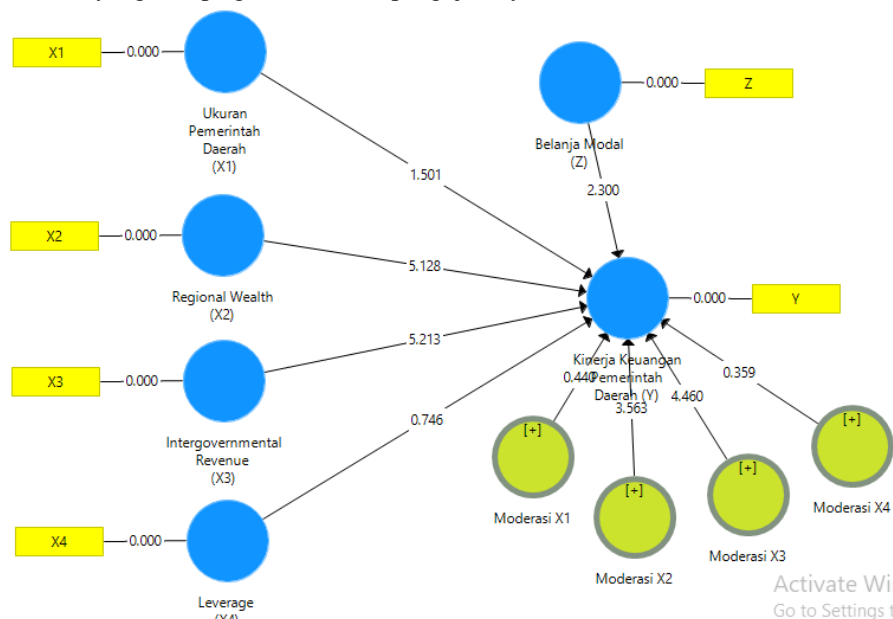
	<i>Cronbach's Alpha</i>
Ukuran Pemerintah Daerah	1.000
<i>Regional Wealth</i>	1.000
<i>Intergovernmental Revenue</i>	1.000
<i>Leverage</i>	1.000
Kinerja Keuangan	1.000
Moderasi X1	1.000
Moderasi X2	1.000
Moderasi X3	1.000
Moderasi X4	1.000
Belanja Modal	1.000

Sumber : Hasil Output *SmartPLS*

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur reabilitas suatu variabel dengan menilai sejauh mana item – item dalam instrumen pengukuran tersebut berkorelasi satu sama lain. Nilai yang tinggi dari *Cronbach's Alpha* menggambarkan tingkat konsistensi yang dalam pengukuran, sedangkan nilai yang rendah menandakan kurangnya konsistensi atau reabilitas. Nilai *Cronbach's Alpha* dianggap baik jika nilainya sebesar > 0.7. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel 6 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar > 0.7 yang artinya instrumen tersebut memiliki reabilitas yang cukup baik.

Evaluasi Inner Model

Langkah berikutnya setelah dilakukan pengujian *outer model* yaitu melakukan pengujian pada *inner model*. Berikut merupakan hasil yang berupa gambar dalam pengujiannya :



Gambar 3
Output Inner Model Moderasi SmartPLS
Sumber Gambar : Data Diolah Di *SmartPLS*

Pengukuran *inner model* digunakan untuk menguji hubungan antara konstruk, mengevaluasi kekuatan dan signifikan, sekaligus nilai *R-Square*. Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan perhitungan *R-Square* yang dihasilkan dalam penelitian ini :

Tabel 7
R-Square

	R Square
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,514

Sumber : Hasil *Output SmartPLS*

Berdasarkan hasil dari tabel 7, penelitian ini menemukan bahwa hasil *R-Square* yang diperoleh sebesar 0,514. Hal tersebut mengindikasikan bahwa validitas konstruk kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 51,4% yang berarti konstruk ukuran pemerintah daerah, *regional wealth*, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* memiliki dampak sebesar 51,4% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipaparkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data yang didapatkan pada gambar 4 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai uji t-statistik dengan nilai *P-Values* menggunakan perhitungan *Bootstrapping*. Jika nilai uji t-statistik > 1.96 dan nilai *P-Values* < 0.5, maka hipotesis akan diterima. Sebaliknya, jika nilai t-statistik < 1.96 dan nilai *P-Values* > 0.5 maka hipotesis akan di tolak. Berikut merupakan hasil uji hipotesis berupa tabel *Path Coefficients* :

Tabel 8
Path Coefficients

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Ukuran Pemerintah Daerah-> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-0.276	-0.280	0.184	1.501	0.136
<i>Regional Wealth</i>-> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1.131	1.150	0.221	5.128	0.000
<i>Intergovernmental Revenue</i>-> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0.974	0.962	0.187	5.213	0.000
<i>Leverage</i>-> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0.062	0.055	0.083	0.746	0.457
Moderasi X1 -> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-0.041	-0.036	0.092	0.440	0.661
Moderasi X2 -> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-0.548	-0.557	0.154	3.563	0.001
Moderasi X3 -> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-0.731	-0.725	0.164	4.460	0.000
Moderasi X4 -> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0.042	0.034	0.116	0.359	0.720

Belanja Modal-> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0.336	0.332	0.146	2.300	0.023
--------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Hasil *Output SmartPLS*

Berdasarkan hasil yang tercantum pada tabel 8, menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah :

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t-statistik sebesar $1.501 > 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.136 > 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.276 sehingga H_1 dalam penelitian ini **ditolak**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan fokus utama pemerintahan daerah yaitu pada pengelolaan keuangan publik dan penggunaan sumber daya yang efisien, tanpa memperhatikan skala fisik dari pemerintah daerah. Lebih memperhatikan bagaimana sumber daya dikelola secara efisien dan transparan untuk kepentingan masyarakat atau *principal*, bukan sekadar ukuran fisik pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah yang lebih besar memiliki anggaran dan sumber daya lebih besar, mereka menghadapi tantangan dan kebutuhan yang lebih kompleks begitupun sebaliknya, pemerintah daerah yang lebih kecil memiliki anggaran terbatas tetapi lebih fokus untuk mengelola masalah dan area yang lebih kecil, memungkinkan efisiensi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga, menurut teori yang dijelaskan ukuran pemerintah tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja keuangannya. Hal ini tidak sesuai dengan teori agensi yang dijelaskan bahwa semakin besar ukuran agen, semakin sulit mengontrolnya dan semakin besar potensi perilaku agen yang tidak sesuai *principal* (masyarakat). Dari penelitian ini, terlihat bahwa peran keseluruhan aset belum optimal dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional dan belum mampu memberikan pelayanan publik yang memadai untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [16] dan [42].

Pengaruh *Regional Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t-statistik sebesar $5.128 > 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar 1.131 sehingga H_2 dalam penelitian ini **diterima**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa *Regional Wealth* (Kekayaan Daerah) **berpengaruh positif signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan suatu daerah, semakin besar potensi pendapatan yang dihasilkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan mengelola manajemen keuangan secara efektif agar tidak bergantung pada dana pemerintah pusat. Tingkat kekayaan (*Regional Wealth*) suatu daerah berkorelasi dengan potensi pendapatan yang bisa dihasilkan melalui pajak, sumber daya alam, dan sektor ekonomi lainnya. Tingkat kekayaan suatu daerah yang tinggi juga mempengaruhi potensi pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur dan mendukung program pembangunan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh [16], [9] dan [6] yang menyatakan bahwa *Regional Wealth* (Kekayaan Daerah) **berpengaruh positif signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t-statistik sebesar $5.213 > 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar 0.974 sehingga H_3 dalam penelitian ini **diterima**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* **berpengaruh positif signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori [26] yang menjelaskan bahwa dengan tersedianya dana tersebut, pemerintah daerah dapat lebih bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan tidak ketergantungan pada pendapatan lokal yang mungkin tidak stabil atau kurang mencukupi, sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan serta mampu mengoptimalkan manfaat dana perimbangan dengan baik. Dengan adanya tambahan pendapatan dana yang stabil dari pemerintah pusat, memungkinkan bagi pemerintah daerah menyediakan layanan publik dan pemerataan pembangunan ekonomi bagi penduduknya. Semakin banyak sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin baik kemampuan mengelola anggaran dan mengelola resiko keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [37] dan [9].

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t-statistik sebesar $0.746 < 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.457 > 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar 0.062 sehingga H_4 dalam penelitian ini **ditolak**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa *leverage* **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena Pemerintah daerah cenderung mengandalkan pendapatan tetap seperti pajak dan transfer dari pemerintah pusat yang tidak elastis dan sulit diprediksi untuk membiayai operasional dan program publik yang dijalankan. Selain itu, pemerintah daerah dihadapkan pada risiko politik, perubahan kebijakan, dan regulasi yang ketat dalam pengelolaan utang, yang dapat membatasi kemampuannya untuk menggunakan leverage secara efektif. Pengaruh kecil *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan juga dapat disebabkan oleh adanya keadaan dimana pemerintah daerah memiliki ekuitas dana yang lebih besar daripada kewajiban. Yang artinya pemerintah daerah memiliki cukup sumber daya finansial untuk menutupi kewajibannya tanpa harus bergantung pada pinjaman. Dengan adanya konteks tersebut, dianjurkan agar pemerintah daerah harus lebih memperhatikan efisiensi pengelolaan anggaran atau diversifikasi sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan pada pinjaman. Sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas sumber daya finansialnya sendiri dalam meningkatkan ekuitas untuk kepentingan jangka panjang masyarakat [26]. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [43] dan [23].

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-statistik sebesar $0.440 < 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.661 > 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.041 sehingga H_5 dalam penelitian ini **ditolak**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa belanja modal **tidak dapat memperkuat** hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disebabkan karena belanja modal seringkali dianggap sebagai pengeluaran modal jangka panjang yang tidak langsung berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan operasional pemerintah daerah. Yang artinya, meskipun belanja modal dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur dan layanan publik, manfaatnya tidak langsung meningkatkan pendapatan operasional seperti pajak atau sumber pendapatan lain yang dapat langsung digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dijelaskan, dimana pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modal secara efisien, misalnya dengan memilih proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melainkan cenderung memilih pembangunan infrastruktur yang kurang strategis sehingga memberikan manfaat jangka pendek seperti perbaikan jalan atau pembangunan saluran air daripada memberikan manfaat ekonomi proyek jangka panjang bagi masyarakat sebagai prinsipal. Dengan demikian, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [29] yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak dapat memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Regional Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh *regional wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimoderasi dengan belanja modal memiliki nilai t-statistik sebesar $3.563 > 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.001 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.548 sehingga H_6 dalam penelitian ini **diterima**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa belanja modal **dapat memperkuat** hubungan antara *regional wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan belanja modal yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapabilitas ekonomi suatu daerah yang biasanya terkait dengan pengembangan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik serta mengembangkan sumber daya manusia. Melalui peningkatan tersebut, pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, menciptakan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal itu yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal juga meningkatkan efisiensi pelayanan publik, yang dapat mengurangi pengeluaran operasional di masa depan dan memperkuat posisi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [38] yang menunjukkan bahwa bahwa belanja modal dapat memperkuat hubungan antara *regional wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimoderasi dengan belanja modal memiliki nilai t-statistik sebesar $4.460 > 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar -0.731 sehingga H_7 dalam penelitian ini **diterima**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa belanja modal **dapat memperkuat** hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan tersebut saling memperkuat karena belanja modal yang dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek pembangunan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi suatu daerah. Dengan begitu, pemerintah menghasilkan peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, baik dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan melalui pajak dan retribusi yang meningkat, serta efisiensi pengeluaran melalui pengelolaan aset yang lebih baik juga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer *intergovernmental*. Oleh karena itu, belanja modal dapat berperan sebagai pemicu untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dan memperkuat hubungan antara *intergovernmental revenue* dengan stabilitas keuangan lokal. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, dimana belanja modal yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap agen. Artinya, jika pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa mereka menggunakan dana *intergovernmental revenue* untuk belanja modal yang produktif, hal ini akan memperkuat hubungan dan kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, pemerintah daerah akan menerima dukungan finansial di masa depan, yang pada gilirannya memperbaiki kinerja keuangan mereka secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [30] dan [44] yang menunjukkan bahwa bahwa belanja modal dapat memperkuat hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 8 diketahui bahwa pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-statistik sebesar $0.359 < 1.96$ dan nilai *P-Values* sebesar $0.720 > 0.05$ dengan koefisien regresi sebesar 0.042 sehingga H_8 dalam penelitian ini **ditolak**. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa belanja modal **tidak dapat memperkuat** hubungan antara *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut tidak dapat memperkuat karena belanja modal yang berupa investasi dalam aset tetap, memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang dan tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dalam jangka pendek. Meskipun belanja modal dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur dan layanan publik, namun jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman untuk belanja modal bisa meningkatkan beban utang pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur lebih teliti dalam memilih strategi yang baik agar penambahan utang tidak memperburuk posisi keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [45] yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak dapat memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dikarenakan peran total aset belum berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Regional Wealth berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tingkat Regional Wealth (Kekayaan Daerah) berperan penting dalam meningkatkan PAD dan dengan kekayaan daerah yang memadai pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Intergovernmental Revenue berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Intergovernmental revenue memberikan sumber pendapatan yang stabil dan fleksibilitas finansial yang cukup penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang terjadi di tingkat daerah. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena mereka memiliki akses terbatas dalam menggunakan leverage. Hal ini disebabkan oleh struktur pendapatan pemerintah daerah yang didominasi oleh penerimaan pajak dan transfer dari pemerintah pusat, yang juga membatasi penggunaan leverage karena risiko terkait fluktuasi pendapatan. Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal yang memberikan manfaat jangka pendek daripada jangka panjang, sehingga tidak memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Belanja Modal dapat memperkuat hubungan antara Regional

Wealth Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Regional Wealth yang meningkat membuat pendapatan daerah ikut naik juga melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Peningkatan pendapatan tersebut yang dapat membuat kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Belanja Modal dapat memperkuat hubungan antara Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan ini dicapai melalui investasi dalam belanja modal untuk meningkatkan sumber daya pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kinerja keuangan. Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Leverage yang tinggi dapat menyebabkan risiko keuangan yang tinggi, seperti bunga yang tinggi, yang dapat mengurangi fleksibilitas keuangan dan membebani anggaran daerah. Hal itu yang mengganggu pemerintah untuk membiayai belanja modal dan membawa risiko kegagalan pembayaran utang, yang dapat merusak kinerja keuangan pemerintah.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya data penelitian yang digunakan hanya mencakup periode 2020 – 2022 karena data untuk periode terbaru 2023 belum tersedia di kantor BPK Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini hanya mempertimbangkan 4 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, namun ada faktor lain yang tidak dapat diperhitungkan juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan periode penelitian dan memperbanyak sampel penelitian agar memperoleh hasil yang lebih optimal. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan ataupun menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan hasil dari usaha dan doa, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah, Ibu, dan Kakak Sekeluarga yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tiada hentinya.
3. Ani dan Nadya, dua sahabatku yang selalu *support* dan menemani saat masa – masa sulit selama proses pengerjaan skripsi serta bersedia mendengarkan keluh kesahku.
4. Laras, Dhea, Cendy, Anis dan Zulfa, sahabat seperjuangan selama 4 tahun yang saling menguatkan satu sama lain dari awal hingga akhir. Terima kasih atas dukungan yang diberikan hingga sekarang, semoga sukses untuk kita semua.
5. Terakhir untuk Alfina Dwi Wulandari, *last but no last*, yaa! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar – besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah bekerja keras, menghadapi berbagai kesulitan, dan tidak menyerah meskipun terkadang merasa lelah dan frustrasi.

REFERENSI

- [1] P. S. Abbas, “Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, Dan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi,” *Univ. Pembang. Nas. Veteran Jakarta.*, 2023, [Online]. Available: <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/24820>
- [2] N. D. A. Darma, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah,” *J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 3, pp. 149–162, 2018, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Dito-Aditia-Nasution/publication/333194179_Analisis_Pengaruh_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_Akuntabilitas_dan_Transparansi_terhadap_Kinerja_Keuangan_Pemerintah/links/5ce063d2299bf14d95a67707/Analisis-Pengaruh-Pengelolaan-

- [3] Armaja, R. Ibrahim, and Aliamin, "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan," *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 3, no. 2, pp. 168–181, 2017.
- [4] Zaini, "Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Turun Hingga Rp 583,4 Miliar," BPK Jatim.
- [5] Antara, "PAD Tak Sesuai Target, APBD Surabaya Dirasionalisasi," Jawa Pos.
- [6] A. Natoen, A. Febrianti, Sarikadarwati, and S. Ardiani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)," *J. Ris. Terap. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 106–117, 2019.
- [7] S. Salsabilla and S. Rahayu, "The Effect Of Wealth, Leverage and Regional Expenditure On Regional Financial Performance (Case Study in Provincial Governments in Indonesia in 2019)," *e-Proceeding Manag.*, vol. 8, no. 6, pp. 8479–8487, 2021.
- [8] N. A. Noviyanti and Kiswanto, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Account. Anal. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2016.
- [9] P. P. Primadiva, D. Rosdini, and S. Mulyani, "Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah," *J. Paradig. Ekon.*, vol. 16, no. 2, pp. 299–310, 2021, doi: 10.22437/jpe.v16i2.11999.
- [10] M. F. Alpi and P. R. Ramadhan, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota," *J. Stud. Akunt. Keuang.*, vol. 2, no. 3, pp. 103–114, 2018.
- [11] C. Rudythia Dwitama, Sri Rahayu S.E., M.Ak., Ak. and Prodi, "Pengaruh Ukuran Pemerintah, Intergovernmental Revenue, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)," *J. Manag.*, vol. 7, pp. 3251–3261, 2020.
- [12] Y. Alvin, M. Y. Basri, and M. A. Hasan, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016)," *J. Online Mhs. FebJ*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2018, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/21643/20941>
- [13] H. A. Manafe, S. Sia Niha, and D. Putu S. Putra, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 3, pp. 541–547, 2023, doi: 10.31933/jemsi.v4i3.1322.
- [14] I. G. M. A. A. Tama and P. H. Adi, "Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah (The Influence of Regional Head Characteristics, Government Size, and Audit Findings on Regional Financial Performance)," *Perspekt. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 91–113, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.uksw.edu/persi>
- [15] P. N. Fitasari and K. Ismawati, "Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)," *J. Ekon. Bisnis Dan ...*, vol. IX, no. 1, pp. 33–40, 2020, [Online]. Available: <http://www.jurnal.usahid solo.ac.id/index.php/IAB/article/view/644>
- [16] N. Aafiah Millenia, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan," *J. Syntax Admiration*, vol. 3, no. 6, pp. 786–803, 2022, doi: 10.46799/jsa.v3i6.448.
- [17] T. Damar, Y. M. Basri, and N. Indrawati, "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah," *J. Al Iqtishad*, vol. 2, no. 16, pp. 39–57, 2020.
- [18] L. H. Oktaviana, I., and Husnan, "The Effect of Fiscal Decentralization, Fiscal Stress And Intergovernmental Revenue on The Financial Performance of Local Government," *J. E-Proceeding STIE Mandala Jember*, pp. 553–571, 2017.
- [19] A. B. Pratama, Maslichah, and M. C. Mawardi, "Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019," *J. Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 09, no. 02, pp. 47–57, 2022.
- [20] I. K. Diah Ekaningtias, Agus Samekto, "The Influence of Intergovernmental Revenue , Capital Expenditure , Original Local Government Revenue and Government Size on Local Government Financial Performance with Audit Opinion as a Moderating Variable," *RJEMS Int. Res. J. Econ. Manag. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 213–223, 2023, doi: 10.56472/25835238/IRJEMS-V2I2P124.
- [21] A. Aziz, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)," *Eksis J. Ris. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 86–101, 2016, doi: 10.26533/eksis.v11i1.34.
- [22] M. Ratna Ayu, *Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*, vol. 4, no. 2. 2015.

- [23] I. P. Sari, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)," *JOM Fekom*, vol. 3 No.1, pp. 679–692, 2016.
- [24] M. I. C. Siregar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua," *J. Apl. Manajemen, Ekon. dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 26–42, 2020, doi: 10.51263/jameb.v5i1.111.
- [25] M. Kusumawardani, "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (The Influence of Size, Prosperity, Legislative Size, Leverage on Regional Government Financial Performance in Indonesia)," *Account. Anal. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–35, 2012.
- [26] D. I. Satria and H. P. Sari, "Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *At-Tasyri*, vol. X, pp. 9–21, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/129%0Ahttp://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/129/87>
- [27] M. E. Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, Dr. M.Shabri A.Majid, SE, "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh," *J. Magister Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 5, no. 3, pp. 30–38, 2016.
- [28] N. S. H. Asnidar, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa," *J. SAMUDRA Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–18, 2019, doi: 10.33772/jak-uh0.v7i1.24546.
- [29] P. Salsabila, "Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, Dan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi.," *Skripsi Thesis UPNVJ*, 2023, [Online]. Available: <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/24820>
- [30] A. Y. Noeng, L. Ardini, and K. Kurnia, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi," *Owner*, vol. 7, no. 4, pp. 2905–2916, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i4.1689.
- [31] K. Rina Novia, "Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua," *Account. J. Univ. Yapis Papua*, vol. 1, no. 1, pp. 30–38, 2019.
- [32] D. K. S. Karno and S. Alliyah, "The Influence Of Local Government Characteristic and BPK Audit Opinion On The Financical Performance Of District/City Governments In Province Jawa tengah," *J. Inspirasi Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 40–55, 2021.
- [33] Y. Kusnadewi Lestari , Sri Rahayu, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi)," no. 5, pp. 53–67, 2019.
- [34] P. R. Masdiantini and N. M. A. Erawati, "Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 14, no. 2, pp. 1150–1182, 2016.
- [35] H. M. Mugi Wismoyo Ajia, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt. dan Gov. Andalas*, vol. 3, no. 1, pp. 97–115, 2020, doi: 10.33395/owner.v7i4.1689.
- [36] H. Mulyani, S., dan Wibowo, "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan," *Kompartemen J. Ilm. Akunt.*, vol. 15, no. 1, pp. 57–66, 2017.
- [37] N. S. F. Afia Maulina, Mustafa Alkamal, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Inf. Syst. Applied, Manag. Account. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 523–531, 2021, doi: 10.52362/jisamar.v5i2.
- [38] I. Hajar, A. Afrizal, F. Fatimah, M. Wahyu, I. Solihat, and J. Simarmata, "Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 24, no. 1, p. 808, 2024, doi: 10.33087/jiubj.v24i1.3926.
- [39] C. Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A., CGCAE., CRMP., QIA, "Laporan Keuangan Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Audited Th 2020 - 2022," Google Search. [Online]. Available: <https://www.bpkp.go.id/jatim/konten/3797/Laporan-Keuangan.bpkp>
- [40] R. Aulia and R. Rahmawaty, "Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 5, no. 4, pp. 584–598, 2020, doi: 10.24815/jimeka.v5i4.16826.
- [41] N. M. D. P. Sari and I. K. Mustanda, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 8, no. 8, p. 4759, 2019, doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
- [42] A. F. Ramahdani and S. Trisnaningih, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya,” *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 6, no. 1, pp. 301–310, 2022, doi: 10.31539/costing.v6i1.3924.
- [43] D. Saraswati and Y. S. Rioni, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *J. Akunt. Bisnis dan Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 110–120, 2019.
- [44] R. M. Sukmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 201,” *Semin. Inov. Manaj. Bisnis dan Akunt. II*, pp. 1–21, 2020.
- [45] Z. Junita Putri Rajana Harahap, Murni Daulay, “Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara,” *KITABAH*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, 2018, [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.